

Judul : Garap RUU Prolegnas prioritas, Baleg DPR janji utamakan kualitas
Tanggal : Selasa, 15 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Garap RUU Prolegnas Prioritas Baleg DPR Janji Utamakan Kualitas

FOTO: TEDY KROENING/MAJO



Bob Hasan

BADAN Legislasi (Baleg) DPR optimistis bisa mengejar target penyelesaian 60 hingga 70 persen RUU dalam Prolegnas Prioritas 2026. Upaya itu jadi bagian DPR untuk mempercepat penuntasan agenda legislasi sepanjang tahun ini. Akselerasi proses pembahasan terus dilakukan agar seluruh target kerja bisa tercapai secara maksimal.

Ketua Baleg DPR Bob Hasan menilai, capaian itu masih memungkinkan untuk dikejar melalui peningkatan progres pembahasan sejumlah RUU prioritas. DPR bahkan berpeluang menambah jumlah aturan yang dapat diselesaikan pada 2026. "Potensi kenaikan target terus terbuka seiring optimalisasi kinerja harian," katanya, Minggu (13/9/2026).

Bob menyoroti pengajuan RUU Kabupaten/Kota terkait Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) usulan Komisi II DPR dapat segera dilakukan. Dua beleid itu memiliki ruang pembahasan relatif terbatas karena hanya menyangkut pasal pajak pariwisata. Itu membuka peluang bagi Baleg menyelesaikannya demi mengejar target legislasi tahun ini.

Penyelesaian RUU NTT dan NTB, kata Bob, membuat Baleg diproyeksikan mampu menuntaskan tujuh hingga

delapan RUU dalam satu tahun. Capaian itu sudah memenuhi target yang hendak dikejar pada 2026. "Pembahasan beberapa pasal terkait pajak pariwisata diperkirakan rampung tanpa memakan waktu lama," ungkapnya.

Penuntasan tujuh hingga delapan RUU pada 2026, sambungnya, membuka peluang peningkatan produktivitas legislasi pada tahun berikutnya. Melalui evaluasi dan pengaturan kerja yang lebih baik, capaian itu bisa terus ditingkatkan. Target pembahasan UU dimungkinkan naik hingga mencapai sembilan sampai 10 regulasi ke depan.

Demi mendukung percepatan itu, Baleg meminta tim ahli segera menyelesaikan matriks bahan penyusunan RUU untuk disampaikan kepada fraksi-fraksi di DPR. Langkah ini dilakukan agar proses pembahasan dapat dipersiapkan secara lebih matang. Setiap fraksi akan mempelajari seluruh materi secara mendalam sebelum memasuki tahapan berikutnya.

Selain itu, seluruh fraksi diminta segera menentukan anggota untuk jadi bagian dari Panja dalam rapat kerja bersama Pemerintah. Pengaturan komposisi anggota Panja juga jadi perhatian agar tidak terjadi rangkap keanggotaan di internal. "Ini dilakukan sebab rangkap posisi dapat menghambat pembahasan," ujarnya.

Sejalan dengan itu, anggota Baleg DPR Jazuli Juwaini berharap, target kuantitas dalam penyusunan Prolegnas tidak mengorbankan kualitas produk hukum. Aturan yang disusun tergesa-gesa sangat rentan digugat masyarakat. Pembentukan UU tanpa pembahasan matang berisiko menghadapi gugatan uji materi atau *judicial review* di Mahkamah Konstitusi (MK). ■ PVB